

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan Amerika Serikat-Suriah, Israel disatukan oleh satu hal: Libanon. Suriah dan Israel berperang demi berebut Libanon, sementara Amerika datang sebagai tuan pelindung dan pendamai pihak-pihak yang bertikai. Hubungan mereka pada awalnya seperti segiempat beda kepentingan, tetapi kemudian benar-benar kehilangan bentuknya.¹

Secara historis, upaya-upaya diplomatik AS untuk mendamaikan konflik Arab-Israel (1948), termasuk dengan cara menggandeng Suriah sebagai kawan, selalu disertai dengan kepentingan-kepentingan strategis, regional, dan bilateral. Kepentingan strategis ini mencakup pencegahan konflik-konflik regional agar tidak memuncak menjadi konfrontasi dua negara adidaya. Amerika menggandeng Suriah untuk memberi alternatif lain supaya tidak berkoalisi dengan Uni Soviet, selain untuk secepat mungkin menyelesaikan peperangan sebab akan berpengaruh terhadap pasokan dan harga minyak dunia.

Kepentingan regional meliputi pengembangan sebuah komunitas kepentingan di antara negara-negara Arab moderat, penghilangan friksi di antara negara-negara Arab yang menjadi kawan AS dan Israel, serta menciptakan kestabilan kawasan dengan membantu pengembangan ekonomi dan sosial.

¹ Dani Wicaksono, (2006) *Segi Empat Hilang bentuk*, dalam <http://daniwicansono.blogspot.com/2006/11/segiempat-hilang-bentuk.html>, diakses pada 15 April 2010.

Terakhir, kepentingan bilateral mengacu pada upaya memuluskan jalan Israel untuk mencapai perdamaian dan situasi normal. Sekaligus, hal ini akan memperkuat ikatan AS dengan negara-negara Arab yang menjadi kawan seraya mengucilkan organisasi-organisasi dan negara-negara radikal. Kalau perlu, AS tak akan segan-segan menggulingkannya (seperti kasus pemerintahan Saddam Hussein di Irak).

Hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Suriah putus setelah Amerika Serikat menarik pulang Duta Besarnya dari Suriah tahun 2005, sebagai protes terhadap pembunuhan Perdana Menteri Libanon, Rafik al-Hariri. Investigasi awal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengindikasikan keterlibatan sejumlah pejabat Suriah dan Libanon dalam pembunuhan itu. Washington dibawah mantan Presiden George W Bush kemudian menuding pemerintah Suriah mendalangi serangan teror yang menewaskan Hariri dan lebih dari 20 orang lainnya.²

Setelah Irak pada tahun 2003, negara berikutnya yang diperkirakan akan menjadi target penjajahan AS adalah Suriah. Sebelum serangan ke Irak pun, AS berulang-ulang mengatakan bahwa Suriah merupakan salah satu negara 'poros setan' di samping Irak, Iran, dan Korea Utara. Sekarang, sebagaimana terhadap Irak terdahulu, AS mencari-cari alasan untuk menyerang Suriah. Negara tetangga Irak ini dituduh sebagai negara teroris dan bajingan. AS memang telah membuat daftar alasan tuduhan tersebut, antara lain: mendukung rezim Saddam Hussain dan teroris serta diduga memiliki senjata pemusnah massal.³

² *Setelah Lima Tahun Tutup, Amerika Buka Kembali Kedutaannya di Suriah*, dalam <http://www.tempointeraktif.com> (17 Februari 2010), diakses 15 April 2010.

³ Wisnu Sudibjo, (2008) *Suriah: Limbung Ditekan AS*, dalam <http://wisnusudibjo.wordpress.com/2008/08/07/suriah-limbung-ditekan-as/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2010.

Situasi Timur Tengah digambarkan semakin panas oleh tekanan keras Amerika Serikat (AS) terhadap Suriah, yang dituduh memberi suaka kepada Presiden Irak Saddam Hussein dan para pengikutnya. Tekanan itu diperberat oleh tuduhan, Suriah menjadi tempat persembunyian persenjataan kimia Irak.

Tekanan AS terhadap Suriah lebih terasa sebagai ancaman yang hanya menambah runyam keadaan Timur Tengah. Teater Timur Tengah yang memanas oleh konflik laten Israel-Palestina, bertambah tegang oleh kasus invasi AS dan Inggris ke Irak. Kasus Irak belum dibereskan, AS mengancam Suriah. Bukan hanya Suriah yang terperangah, masyarakat global pun menjadi geram. Timbul kekhawatiran, Suriah akan mengalami nasib serupa dengan Irak.

Petaka serupa dikhawatirkan akan meluas ke Suriah. Ancaman AS atas Suriah dianggap serius, lebih-lebih dikaitkan lagi dengan hubungan bilateral tidak harmonis. Suriah dikenal vokal menentang AS dalam konflik Israel-Palestina. Suriah juga menentang keras terhadap invasi AS-Inggris ke Irak.

Semangat permusuhan sudah terbentuk, sehingga yang diperlukan hanyalah *casus belli* (peristiwa dadakan) yang mendorong konflik terbuka. Tuduhan bahwa Suriah telah memberi suaka kepada Saddam dan menjadi tempat persembunyian persenjataan kimia Irak, dapat digunakan AS sebagai *casus belli*.

Lebih memprihatinkan lagi, jangan-jangan tuduhan ke Suriah sengaja dibuat untuk menutupi aib atas kegagalan menemukan bukti konkret kepemilikan dan penggunaan senjata pemusnah massal Irak. Atau Suriah memang telah dirancang menjadi target serangan AS berikutnya, dan alasan yang dikemukakan hanyalah sekadar dalih.

Korban berikutnya bisa saja Suriah. Presiden AS George Bush telah menuntut sikap kerja sama Suriah dalam mengungkapkan tempat persembunyian

Presiden Irak Saddam Hussein dan persenjataan kimia Irak. Tuntutan bernada ancaman itu pernah digunakan terhadap Irak. Upaya menyudutkan Suriah kelihatan dilakukan secara sistematis seperti dilakukan Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld. Sejak invasi ke Irak dilakukan, Rumsfeld menuduh Suriah mendukung pasukan Pemerintahan Presiden Saddam.

Setelah invasi ke Irak mengalami antiklimaks, AS menuduh Suriah memberi suaka kepada Saddam dan pejabat Irak lainnya, serta menjadi tempat penyembunyian persenjataan kimia Irak. Tetap tidak jelas bagaimana AS sampai pada kesimpulan itu.

Ancaman AS terhadap Suriah diduga tidak terlepas pula dari isu terorisme. AS memasukkan Suriah dalam daftar negara-negara yang dicurigai mendukung gerakan terorisme global. Kaum konservatif di AS bahkan menginginkan agar setelah Irak, dilakukan "perubahan rezim" di Suriah dan Iran.⁴

Pada tahun 2006 Menteri Luar Negeri Suriah, Walid Maalim mengecam pemerintah AS yang diindikasikan membantu pendanaan kelompok separatis anti pemerintah Suriah. Kecaman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Damaskus, terkait keputusan Washington untuk memberikan bantuan sebesar 5 juta dolar untuk kelompok yang disebut AS dengan "Kelompok Reformasi Demokratik Suriah".

Menanggapi keputusan AS tersebut, Suriah segera menuding AS telah melakukan intervensi dan campur tangan yang harus ditolak untuk urusan dalam negeri Suriah. Damaskus memandang apa yang dilakukan AS adalah dalam rangka meningkatkan tekanan AS terhadap Suriah, terkait tewasnya PM Libanon

⁴*Betapa Kondisi Rumah Sendiri Begitu Carut-marut*, dalam http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=1643&coid=4&caid=9&gid=4, diakses pada tanggal 26 Mei 2010.

Rafiq Hariri. Terbunuhnya mantan PM Libanon, Rafik Hariri, memancing kemarahan AS.⁵

Memang, saat ini, tinggal Suriah dan Iran yang belum menunjukkan kepatuhan totalnya kepada AS. Sehingga menambah kemarahan AS sebagai negara adidaya satu-satunya di dunia yang bisa melakukan apapun demi kepentingannya. Keadaan tersebut membuat hubungan AS-Suriah semakin keruh dan memanas yang nampaknya akan berimbas pada situasi proses perdamaian di Timur Tengah.

Di kawasan Timur Tengah terdapat beberapa kelompok anti Israel yang selalu menjadi batu penghalang bagi bagi keberadaan Israel dan memicu konflik karena Israel menganggap mereka sebagai organisasi atau kelompok yang bisa mengancam keberadaan dirinya. Seperti Hizbullah di Libanon dan Hamas di Palestina.

Dalam beberapa tahun terakhir ini Israel merasa terkepung oleh musuh-musuh utamanya. Seperti Iran dengan program nuklirnya yang siap menghancurkan Israel kapan saja. Keberadaan Hamas di Palestina dan Hizbullah di Libanon juga menjadikan Israel harus selalu dalam keadaan siap siaga menghadapi gempuran perang mereka kapanpun.

Kehadiran Presiden Barack Obama mulai memberi warna baru pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Barack Obama menjanjikan corak kemitraan AS yang baru di Timur Tengah sebagai awal diplomasi yang berakar dari "saling hormat dan berbagi kepentingan". Hubungan

⁵ <http://219.83.123.215/berita/dunia/cetak/suriah-kecam-as-karena-danai-aktifitas-kelompok-anti-pemerintah>, diakses pada tanggal 30 Mei 2010.

AS-Suriah sebagai salah satu negara di Timur Tengah yang telah beberapa tahun terakhir membeku nampaknya akan segera mencair kembali.

Tim Obama telah mengakui pentingnya Syria dan perannya dalam menciptakan sebuah kawasan tanpa konflik yang brutal dan mahal. Jeffrey Feltman, Penjabat Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Dekat, dan Dan Shapiro dari Dewan Keamanan Nasional telah dua kali mengunjungi Damaskus, delegasi militer Komando Pusat AS bertemu dengan petinggi militer Syria di sana untuk membicarakan masalah-masalah keamanan menyangkut Irak, dan Mouallem dan Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri AS, telah berbicara melalui telepon untuk meretas jalan bagi hubungan bilateral yang lebih jauh. Dan kini, setelah sekian lama dinanti-nanti, Amerika Serikat telah mengumumkan akan mengutus seorang duta besar ke Damaskus, sebuah posisi yang telah dibiarkan lowong selama empat tahun.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengambil langkah maju yakni akan membuka kembali kantor kedutaan besarnya di Damaskus, Suriah, yang sudah lima tahun tutup. Washington kini telah siap untuk kembali menempatkan duta besarnya di Damaskus. Obama akan menunjuk Robert Ford sebagai duta besar di Damaskus. Ford, yang fasih berbahasa Arab, dianggap berpengalaman di wilayah krisis dan saat ini ia menjabat sebagai wakil duta besar di Baghdad.

Di dalam wacana politik terdapat istilah “tidak ada makan siang gratis”, bahwa rencana politik AS dengan membuka kembali hubungan dengan Suriah dengan menempatkan duta besar barunya tentunya memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Apa kepentingannya?

B. Pokok Permasalahan

Apa kepentingan Amerika Serikat pada tahun 2010 membuka kembali hubungan diplomatik dengan Suriah yang telah putus sejak tahun 2005?

C. Kerangka Dasar Teoritik

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variable-variable dan hubungan-hubungan antar variable berdasarkan konsep definisi tertentu. Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan mengapa fenomena itu terjadi.⁶ Konsep adalah abstraksi yang mewakili obyek atau fenomena.⁷

Untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi serta untuk memilih konsep yang tepat dalam membentuk hipotesa, maka diperlukan suatu kerangka teoritis. Untuk menjelaskan kepentingan Amerika membuka kembali hubungan diplomatik dengan Suriah, titik berat penulis pada tingkat politik luar negeri Amerika dalam pencapaian tujuan nasionalnya. Untuk memperjelas hal tersebut, penulis menggunakan:

1. Teori Politik Luar Negeri

Menurut Jack Plano dan Roy Olton, *Foreign Policy* adalah sebuah strategi atau tindakan terencana yang dikembangkan oleh *decision maker* dari sebuah negara terhadap negara lain atau unit-unit internasional yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan kepentingan nasional.⁸

⁶ Mohtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal 219.

⁷ Sofyan Efendi, *Unsur-unsur Pengertian Ilmiah*, Jakarta, LP3ES, hal 14.

⁸ Jack C Plano and Ray Olton, *The International Relations Dictionary*, Third Edition, Western Michigan University (ABL-Clio, California 1980), hal 27.

Teori politik luar negeri adalah teori yang menjelaskan pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya.⁹ Dalam hubungannya dengan negara lain, politik luar negeri berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang mengikuti serangkaian tindakan khusus. Analisa kebijakan luar negeri adalah usaha untuk mendapatkan penjelasan rasional mengapa suatu negara berperilaku demikian. Dengan ringkas dinyatakan bagaimana cara menentukan tujuan, menyusun prioritas, menggerakkan mesin pengambil kebijaksanaan, pemerintah, dan mengelola sumberdaya manusia dan alam untuk bersaing dengan negara lain di lapangan internasional dengan hasil yang baik, sementara penelitian politik luar negeri mencari jawaban atas pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" suatu rangkaian tindakan dilakukan. Politik Internasional berurusan dengan konsekuensi pertentangan politik luar negeri di lingkungan dunia yang kompetitif ini.¹⁰

Politik luar negeri digambarkan sebagai penghubung antara lingkungan domestik dan lingkungan eksternal suatu negara. Ia juga bisa digambarkan sebagai halaman yang menghubungkan dua rumah yang saling berhadapan, yaitu rumah yang dihuni oleh masyarakat domestik dan masyarakat negeri lain. Dan memang yang menghubungkan berbagai negara yang berdaulat adalah politik luar negeri. Karena itu setiap pendekatan dalam pembahasan tentang politik luar negeri harus bisa menunjukkan metode untuk mengevaluasi hubungan itu. Pendekatan dalam politik luar negeri ini mengacu pada konsep "kepentingan nasional".¹¹

⁹ Mohtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal 221.

¹⁰ Padmo Wahjono dan Nazarudin Syamsudin, *Pengantar Ilmu Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 399.

¹¹ Ibid.

Dalam konteks politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Suriah, bahwa AS pada tahun 2005 pada masa pemerintahan George W Bush menarik duta besarnya dari Suriah namun setelah terpilihnya Barack Obama sebagai presiden AS akhirnya membuka kembali hubungan yang sempat putus selama lima tahun belakangan ini.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Setiap kebijakan luar negeri, suatu negara senantiasa mendasarkan pada kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional seringkali dipakai sebagai alat untuk menganalisa, untuk mengetahui tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Paul Seabury mendefinisikan konsep kepentingan nasional dalam dua aspek, yakni normatif dan deskriptif. Secara normatif, konsep kepentingan nasional mengacu pada serangkaian tujuan ideal yang seharusnya diusahakan untuk diwujudkan oleh suatu bangsa dalam hubungannya dengan negara lain. Secara deskriptif, konsep kepentingan nasional dapat dianggap sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui kepemimpinannya dengan perjuangan yang gigih.¹²

Menurut Jack C. Plano dan Ray Olton:

*Kepentingan Nasional adalah The fundamental objective ultimate determinant that guides the decision maker of a state is foreign policy. The national interest of state is typically a highly generalized conception of those aliament that constitute the state most vital needs. These include self preservation, independence, territorial integrity, military security and economic wellbeing.*¹³

Dari definisi tersebut menggambarkan bahwa prioritas kepentingan nasional setiap negara berbeda antara satu negara dengan negara lainnya,

¹² K.J. Holsti. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Jakarta, Erlangga; 1988, hal. 136

¹³ Jack C Plano and Ray Olton, *The International Relations Dictionary*, Third Edition, Western Michigan University (ABL-Clio, California 1980), hal 9.

tergantungan pada kebutuhan negara yang bersangkutan. Namun para ahli cenderung menempatkan masalah *survival* dan *self preservation* sebagai prioritas utama. Dan tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat kebijakan dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsepsi umum tetapi merupakan unsur yang mkenjadi kebutuhan yang vital bagi suatu negara.

Dalam konsep ini, ada lima kategori umum yang dijadikan sasaran yang hendak dituju yaitu: (1)*self preservation*, yaitu hak untuk mempertahankan diri; (2)*independence*, yang berarti tidak dijajah atau tunduk pada negara lain; (3)*military security*, yang berarti tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain; (4) *territorial integrity* atau keutuhan wilayah dan (5) *economic wellbeing* atau kesejahteraan ekonomi.¹⁴

Dalam konteks AS, kepentingan nasional yang dicapai AS dari waktu ke waktu adalah: (1) mempertahankan negara AS dan sistem konstitusionalnya, (2) perluasan eksistensi AS dan mempromosikan produk-produknya ke luar negeri, (3) menciptakan suatu tata dunia baru atau sisitem keamanan internasional yang *favorable*, (4) mempromosikan nilai-nilai demokrasi AS dan sisitem pasar bebasnya.¹⁵

Amerika Serikat memiliki kepentingan pribadi (*self-interest*) di Timur Tengah, baik yang berkaitan dengan *low politics* (dalam hal ini ekonomi) maupun *high politics* (keamanan). Kepentingan ekonomi di dalamnya meliputi kebutuhan

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Rusdiyanta, S.IP, M.Si, *AMERIKA SERIKAT DAN PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA*, dalam http://www.scribd.com/document_downloads/direct/26799620?extension=pdf&ft=1279006306<=1279009916&uahk=eLvjGY61e6ibt1e0+1kevU92m34, diakses pada tanggal 9 Juli 2010.

akan minyak dan pemasaran persenjataan. Kepentingan keamanan diterjemahkan sebagai *self-defense* Amerika menghadapi kekuatan Islam.

Ketika mayoritas produksi minyak dikendalikan oleh negara-negara Islam, hal tersebut akan memunculkan kekhawatiran Amerika terhadap suplai minyaknya. Minyak kemudian bisa menjadi alat bagi kekuatan Islam untuk menekan Amerika. Untuk itu, sebagai bentuk tekanan Amerika agar negara-negara Islam tidak melakukan hal tersebut, Amerika turut ‘memperkuat’ Israel sebagai ancaman terdekat dan paling mungkin memicu konflik di kawasan produsen minyak terbesar dunia itu.

Dalam konteks *self-defense*, kembali hubungan yang terjadi adalah kekuatan Amerika Serikat menghadapi kekuatan Islam. Semakin kuat Israel, maka semakin kuat pula pertahanan Amerika. Hal ini disebabkan Israel merupakan tangan Amerika yang berada di wilayah negara-negara Islam. Ketika tekanan dari dunia Islam meningkat, maka dengan segera Amerika bisa bereaksi dengan tekanan balik Israel. Karenanya hingga kini Amerika terus memberikan bantuan kepada Israel.¹⁶

D. Hipotesa

Dari permasalahan di atas, maka dapat ditarik sebuah hipotesa bahwa yang mendasari kepentingan Amerika membuka kembali hubungan diplomatik dengan Suriah adalah:

¹⁶*Hubungan Amerika Serikat-Israel: Ladang Implementasi Realisme*, dalam http://conformeast.multiply.com/journal/item/10/Hubungan_Amerika_Serikat-Israel_Ladang_Implementasi_Realisme, diakses pada tanggal 28 Juni 2010.

1. Program nuklir Iran yang berkembang dewasa ini merupakan ancaman bagi Amerika Serikat.
2. Posisi Israel sebagai "anak emas" Amerika Serikat di Timur Tengah semakin terancam keberadaannya.
3. Peran strategis Suriah di Timur Tengah membuat AS perlu untuk membuka kembali hubungan diplomatiknya.

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah biasanya dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai fenomena tertentu. Penulisan skripsi ini bertujuan antara lain untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan Amerika membuka kembali hubungan diplomatik dengan Suriah.
2. Mengkaji secara garis besar mengenai dinamika hubungan Amerika dengan Suriah.
3. Secara teoritis maupun metodologis, penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan terhadap perkembangan dan pendalaman studi Ilmu Hubungan Internasional

F. Metode Pengumpulan Data

Penulisan ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka teori dan konsep, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan dengan data-data empiris.

Pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau *library research*. Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, makalah ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, internet dan sumber-sumber lain. Penulis juga memanfaatkan fasilitas internet serta sumbangsih dunia pers yang terhimpun lengkap pada koleksi klipng koran yang memuat berita maupun komentar tentang subjek yang penulis pilih.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam skripsi ini penulis memberi batasan penelitian dari tahun 2005-2010. Hal ini dikarenakan pada tahun 2005 Amerika menarik duta besarnya dari Suriah dan pada tahun 2010 Amerika membuka kembali hubungan diplomatik dengan Suriah dengan menempatkan duta besarnya. Dan tidak menutup kemungkinan di luar tahun tersebut.

H. Sistematika Penulisan

BAB I

Pada bab ini akan memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teoritik, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II

Pada bab II akan mendeskripsikan tentang dinamika hubungan AS-Suriah yang akan diawali dengan Keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah, Hubungan Amerika Serikat Dengan Suriah, Putusnya Hubungan Diplomatik Amerika Serikat

Dengan Suriah, Kondisi Pasca Putusnya Hubungan Amerika Serikat Dengan Suriah.

BAB III

Pada bab III akan berisi tentang langkah-langkah AS membuka kembali hubungan dengan Suriah yaitu dengan mendeskripsikan tentang Haluan Politik Luar Negeri Barack Obama yang mengindikasikan hubungan baik dengan Dunia Islam dan kunjungan beberapa pejabat penting AS ke Suriah sebagai langkah awal menuju dimulainya hubungan dengan Suriah.

BAB IV

Bab ini akan berisi tentang Islam sebagai ancaman baru AS, keterancaman Israel di Timur Tengah dan posisi strategis Suriah di Timur Tengah.

BAB V

KESIMPULAN

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN DIPLOMATIK AMERIKA SERIKAT

DENGAN SURIAH

Ada banyak faktor yang membuat kawasan Timur Tengah ini menjadi rebutan bangsa-bangsa besar seperti Amerika, Inggris dan Prancis. Kawasan Timur Tengah, sebagai mana yang kita ketahui, adalah sebuah kawasan yang memiliki beberapa keistimewaan.

Pertama, Timur Tengah adalah kawasan yang kaya minyak. Minyak adalah darah bagi sebuah negara teknologi. Tanpa minyak, negara teknologi akan mati. Dan minyak ini pulalah yang menjadi faktor sangat penting sehingga negara-negara industri seperti Amerika, Perancis, Inggris menjadi tergila-gila untuk menguasai kawasan ini dengan segala cara walau mengorbankan nyawa orang-orang yang tak berdosa sekalipun.

Kedua, Timur Tengah adalah wilayah yang menjadi "jembatan strategis" untuk menghubungkan ke tiga benua: Asia, Afrika, Eropa. Nah, negara-negara Eropa yang sangat bergantung kepada minyak, tentu saja menjadikan laut Timur Tengah tersebut sebagai jalan pintas untuk mengangkut minyak dari Timur Tengah itu ke benua Eropa. Sebab, pengangkutan minyak itu dilakukan via laut dan tidak mungkin untuk diangkut via darat ataupun udara.

Ketiga, Timur Tengah adalah negeri dimana diturunkannya tiga agama besar, yaitu Yahudi, Nasrani (Kristen) dan Islam. Faktor agama ini juga membuat